**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakin 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitupun sebaliknya, menurut data tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 ada 887 Tindak Pidana Korupsi yang ditangani KPK, dengan peringkat pertama adalah penyapan dengan 564 kasus, dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dengan 188 Kasus.

Oleh karena itu sektor Pengadaan Barang/Jasa butuh perhatian khusus oleh Pemerintah dan Masyarakat, untuk mengawal pelaksanaannya mulai dari tahap perencanaan, penganggaran sampai dengan implementasi.

Pemerintah telah membuat beberapa Sistem Informasi untuk melakukan Transparansi Pengadaan Barang/Jasa seperti SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), dll. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017 juga telah mengembangkan Sistem Informasi Keterbukaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bojonegoro yang diberi nama Bojonegoro Open System (BOS) yang bisa diakses melalui [http://bos.bojonegorokab.go.id](http://bos.bojonegorokab.go.id/)yang diluncurkan pada bulan Februari 2018 di Pendopo Kabupaten Bojonegoro.

Bojonegoro Open Sistem (BOS) merupakan sebuah aplikasi keterbukaan data kontrak yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang bertujuan agar masyarakat bisa terlibat dalam pengawasan pengadaan Barang/Jasa. Data dari Bojonegoro Open Sistem berasal dari input Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, namun setalah beberapa bulan data di aplikasi Bojonegoro Open Sistem tidak lagi diinput oleh OPD. Menurut beberapa OPD aplikasi ini hanya menambah pekerjaan mereka, karena selain diinput di aplikasi Bojonegoro Open Sistem data kontrak tersebut harus diinput di aplikasi lain seperti SiRUP dan LPSE. Factor lain yang menjadi penyebab dari tidak diinputkannya lagi data pengadaan di aplikasi adalah karena, aplikasi tersebut menjadi lemot karena banyaknya data yang ditampilkan.

Oleh karena itu saya ingin mengembangkan sistem informasi keterbukaan pengadaan barang/jasa yang data dari aplikasi tersebut tidak perlu input manual, melainkan langsung mengambil data dari aplikasi terkait seperti SiRUP dan LPSE menggunakan metode data scraping, dan saya akan mendesain Sistem Informasi tersebut agar bisa menampilkan data dalam jumlah besar.

* 1. **Rumusan Masalah**

Dari penjelasan di atas maka dapat diambil suatu perumusan masalah yaitu sebagai berikut :

Bagaimana cara perancangan dan pembuatan Sistem Informasi Keterbukaan Data Kontrak Berbasis Web di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

* 1. **Tujuan Penelitian**

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk merancang dan membuat Sistem Informasi Keterbukaan Data Kontrak Berbasis Web di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

* 1. **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari skripsi ini adalah :

1. Di bidang Keilmuan:
2. Bagi Penulis

Penulis dapat mengembangkan pengetahuan tentang pengembangan sistem informasi berbasis web dan pengolahan basis data dengan Mysql.

1. Bagi peneliti/programmer selanjutnya

Peneliti lain dapat menjadikan hasil perancangan yang penulis lakukan sebagai bahan referensi atau mengembangkan judul yang relevan.

1. Di bidang praktisi
2. Mempermudah masyarakat sipil untuk memantau proyek pengadaan barang/jasa di sekitar mereka.
3. Menyediakan wadah untuk masyarakat sipil di Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan aspirasi terkait Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
   1. **Batasan Masalah**

Berdasarkan beberapa pokok permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dibatasi pada identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dibatasi pada rekayasa perangkat lunak Sistem Informasi Keterbukaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Berbasis Web.

Adapun batasan masalah lain dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem ini digunakan untuk mengintegrasikan antara Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
2. Sistem ini hanya mengolah data pengadaan yang dilakukan pemerintah kabupaten bojonegoro.
3. Sistem ini mengambil data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
4. Sistem ini mempunyai fungsi user login yang membatasi user menuju halaman admin, relawan, dan warga.